

Berani Abai Prokes? Siap-siap Kena Operasi Zebra

BOGOR (IM)- Polda Jabar dan Polres Bogor menggelar Operasi Zebra Lodaya tahun 2021. Tujuannya, mendisiplinkan masyarakat dalam berlalu lintas dan protokol kesehatan.

Giat Operasi Zebra Lodaya berlangsung mulai hari ini, Senin (15/11) hingga (28/11) mendatang. Polres Bogor mengerahkan 284 orang personilnya, yang tersebar hingga ke 33 polsek. "Tujuan giat ini ialah meningkatkan disiplin masyarakat dalam melaksanakan aturan berlalu lintas dan prokes Covid-19," ucap Kapolres Bogor, AKBP Harun kepada wartawan.

AKBP Harun menerangkan bahwa tujuan peningkatan disiplin dalam pelaksanaan prokes pada giat Operasi Zebra Lodaya, tak lain demi menekan penyebaran Covid-19. "Kalau nanti ada kerumunan massa dan pelanggaran aturan Prokes Covid-19, maka jajaran kepolisian dan lainnya akan melakukan tindakan preventif, simpatik dan humanis," terangnya.

AKBP Harun mengimbau para anggota untuk tidak arogan ketika bertugas dalam giat Operasi Zebra Lodaya ini. Ditemui di tempat yang sama di Mako Polres Cibinong, Kasatlantas Polres Bogor, AKP Dicky Anggi Pranata menjelaskan dalam giat Operasi Zebra Lodaya, jajarannya juga akan membagikan masker dan paket bantuan sembako.

"Bagi pengendara lalu lintas yang tidak menggunakan masker maka akan kami berikan masker dan bagi masyarakat yang kurang mampu, kepolisian dan jajaran lainnya juga akan membagikan ratusan paket sembako. Dalam giat Operasi Zebra Lodaya tahun ini kami berharap ada pengurangan jumlah pelanggaran, hingga juga bakal menekan angka kecelakaan lalu lintas," jelas AKP Dicky.

● gio

Lampung Kembangkan Pertanian Terintegrasi

BANDARLAMPUNG (IM)- Pemerintah Provinsi Lampung Tengah mengembangkan sistem pertanian terpadu atau integrated farming guna meningkatkan produktivitas hasil pertanian di daerahnya.

"Kita coba kembangkan integrated farming untuk tanaman pokok, sehingga produktivitas hasil pertanian bisa ditingkatkan," ujar Pelaksana Tugas Asisten Perencanaan dan Pembangunan Provinsi Lampung, Kusnadi, di Bandar Lampung, Senin (15/11).

Ia mengatakan, dengan penggunaan pola integrated farming tersebut ketahanan pangan pun dapat terbentuk. "Sistem pertanian terpadu ini menjadi salah satu usaha untuk meningkatkan produksi, juga menjadi salah satu upaya menumbuhkan minat petani dalam menanam komoditi pertanian karena ada jaminan pasar, lalu ketahanan pangan pun terbentuk," katanya.

Dia melanjutkan, melalui pola pertanian terintegrasi petani tidak hanya terpaku pada satu jenis komoditas pertanian melainkan dapat membudidayakan banyak komoditas dalam satu lahan. "Dengan integrated farming ini memberi kemudahan bagi petani, dimana nanti kita juga bantu untuk memberikan benih, pupuk, pemenuhan sarana produksi, dan sarana permodalan," ucapnya.

Ia mengatakan, dengan adanya sistem pertanian terpadu atau "Integrated Farming System" diharapkan pertanian Lampung dapat maju.

Sebelumnya Kementerian Pertanian pun telah mendorong pemerintah daerah untuk mengimplementasikan sistem pertanian terpadu untuk menumbuhkan sektor pertanian di masa pandemi Covid-19. Pertanian terpadu merupakan salah satu sistem dalam sektor pertanian di mana pertanian, perikanan, peternakan terintegrasi dalam satu kawasan. ● pra

IDN/ANTARA



BANJIR ROB PEKALONGAN

Petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mengevakuasi warga yang terjebak banjir di Clumprit, Degayu, Pekalongan, Jawa Tengah, Senin (15/11). Menurut warga setempat, air yang menggenangi daerah itu disebabkan karena air laut pasang sejak Jumat (12/11) dengan ditambah air hujan intensitas ringan yang menyebabkan ketinggian air hingga mencapai sekitar 30-50 centimeter.

Sekolah Rawan Bencana di Bandung Barat Boleh Hentikan PTM Sementara

BANDUNG (IM)- Sekolah yang ada di daerah rawan bencana, di Kabupaten Bandung Barat (KBB), di-bolehkan untuk menghentikan sementara Pembelajaran Tatap Muka (PTM).

Hal itu sebagai antisipasi terjadinya bencana yang bisa mengancam keselamatan guru dan siswa, saat berada di lingkungan sekolah, mengingat saat ini sedang dalam kondisi cuaca ekstrem.

"Untuk sekolah yang berada di daerah rawan bencana, silakan ambil kebijakan sesuai dengan hasil kajian di lingkungan sekolahnya. Kalau rawan bencana, PTM jangan dilaksanakan, ganti dengan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ)," kata Kepala Bidang Pendidikan Dasar, Dinas Pendidikan (Disdik) KBB, Dadang A Sapardan, Senin (15/11).

Dadang mengatakan, terkait kebijakan PTM bagi sekolah yang berada di daerah rawan bencana itu sepenuhnya diserahkan ke pihak sekolah masing-masing. Meski begitu, pihaknya meminta agar sekolah tetap harus siap menghadapi bencana alam.

Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), ada 11 kecamatan yang masuk kategori rawan bencana. Seperti di Rongga, Gununghalu,

Cipongkor, Sindangkerta, Cililin, Cipatat Saguling, Cisaru, Parongpong, Lembang, dan Ngamprah.

"Selama ini PTM juga sudah ada pembatasan jam pelajaran maupun pembatasan siswa. Tapi karena cuaca ekstrem, harus diperketat lagi dalam mengantisipasi bencana," sambungnya.

Pihaknya juga meminta agar sekolah yang berpotensi tinggi terdampak banjir dan longsor untuk segera melaporkan ke Dinas Pendidikan supaya bisa segera ditindaklanjuti. Semisal di sekolahnya itu ada tebing-tebing yang belum di TPI, itu bisa dilaporkan untuk diantisipasi.

Namun, sejauh ini pihaknya belum mendata sekolah mana saja yang masuk di daerah rawan bencana tersebut. Kendati demikian sudah mendapat laporan ada 10 sekolah yang rawan terdampak bencana alam. Surat edaran juga sudah diserahkan ke masing-masing sekolah di daerah rawan bencana tersebut.

"Edarannya pihak sekolah harus membersihkan gorong-gorong atau saluran air yang ada di dekat sekolah. Terus juga harus mengontrol kondisi bangunan, sehingga kalau sekiranya berisiko, sudah jalankan saja PJJ," pungkasnya. ● pur

8 | Nusantara



IDN/ANTARA

PERBAIKAN JALAN AMBLAS DI SANGGAU

Sebuah eskavator melakukan perbaikan jalan yang amblas di kilometer 10 di Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, Senin (15/11). Jalan nasional di kilometer 10 yang mengalami amblas akibat penyangga tebing longsor pada pekan lalu tersebut sedang diperbaiki Satker PJJ Wilayah II Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Pontianak agar akses jalur penghubung ke empat kabupaten (Sekadau, Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu) di wilayah timur Kalbar tidak terputus.

Tanah Bergerak, 182 Warga Kabupaten Bogor Mengungsi

Saat ini, BPBD bersama Tagana dan Dinas Sosial Kabupaten Bogor sudah membuka dapur umum untuk kebutuhan makan pengungsi. Tim Reaksi Cepat (TRC) pun masih terus melakukan pemantauan di lokasi karena kondisi belum kondusif.

BOGOR (IM)- Tanah bergerak terjadi di Kampung Cigandel, Desa Sukawangi, Kecamatan Sukamakmur, Kabupaten Bogor. Akses jalan

desa juga amblas. Akibatnya, 182 warga mengungsi.

Kabid Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Bogor, Aris Nurjatmiko men-

gatakan, peristiwa itu terjadi secara bertahap sejak Kamis (11/11). Hal itu karena intensitas hujan tinggi yang mengguyur dalam beberapa waktu terakhir.

"Kami terima laporan hari Sabtu kemarin, keretakan tanah dari titik awal ke titik akhir panjangnya sudah sekitar 100 meter. Lebar rengkahan 10 hingga 30 sentimeter, dengan kedalaman sekitar 30 hingga 50 sentimeter," kata Aris dalam keterangannya, Senin (15/11).

Dari kejadian tersebut sudah terdapat satu rumah warga yang dihuni 2 keluarga dengan

6 jiwa mengalami kerusakan. Pergerakan tanah yang terjadi membuat belakang rumah itu amblas sekitar 15 sentimeter.

"Akses jalan desa ke Kampung Cigadel juga amblas kedalaman 50 sentimeter," tambah Aris.

Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam kejadian ini. Namun, sebanyak 41 rumah warga yang dihuni 49 keluarga dengan 182 jiwa terpaksa mengungsi karena khawatir pergerakan tanah makin parah.

"Ada 40 keluarga yang mengungsi ke SDN Gunung Batu dan sisanya 9 keluarga

mengungsi ke rumah-rumah saudaranya masih di daerah Desa Sukawangi," jelasnya.

Saat ini, BPBD bersama Tagana dan Dinas Sosial Kabupaten Bogor sudah membuka dapur umum untuk kebutuhan makan pengungsi. Tim Reaksi Cepat (TRC) pun masih terus melakukan pemantauan di lokasi karena kondisi belum kondusif.

"Tim beserta warga melaksanakan pemantauan lokasi perserakan tanah secara bergantian karena struktur tanah masih bergerak dan apabila hujan turun dikhawatirkan bertumbuh parah," tutup Aris. ● gio

Dinas Pertanian Karawang Serius Cegah Alih Fungsi Lahan Pertanian

KARAWANG (IM)- Dinas Pertanian Kabupaten Karawang, Jawa Barat, menyatakan pihaknya sangat serius dalam mencegah alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian.

"Kami serius, kami sudah punya Perda LP2B (Lahan Pertanian dan Pangan Berkelanjutan) yang mengatur tentang pencegahan

alih fungsi lahan pertanian," kata Kepala Dinas Pertanian setempat Hanafi, di Karawang, Senin (15/11).

Ia mengatakan dalam ketentuan tersebut ada pembatasan kegiatan alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian dalam beberapa tahun ke depan. Keberadaan Peraturan

Daerah (Perda) LP2B tersebut merupakan bagian dari upaya mempertahankan areal lahan pertanian di Karawang.

Saat ini luas baku sawah di Karawang mencapai 97.000 hektare. Namun dalam beberapa tahun ke depan tentunya ada potensi alih fungsi lahan pertanian. Karena itu

dalam ketentuan Perda LP2B tersebut Pemkab Karawang "mengunci" 87 ribu hektare areal sawah yang tidak boleh dialihfungsikan.

Disampaikan, selain membuat regulasi untuk menjaga alih fungsi lahan pertanian ke nonpertanian, Hanafi juga menyebutkan pihaknya telah

membuat regulasi tentang perlindungan pertanian.

Dalam ketentuan itu terdapat perlindungan bagi petani yang mengalami gagal tanam atau gagal panen. Bahkan ke depan bagi petani yang hasil panennya anjlok akan mendapat asuransi. ● pur

Lembang Darurat Bencana! Pemerintah Siapkan Skema Relokasi

BANDUNG (IM)- Warga Lembang siap-siap direlokasi. Pemerintah setempat mulai menyiapkan skema menyusul status darurat bencana di kawasan tersebut.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bandung Barat (KBB) mencatat 10 bencana di empat kecamatan dan tujuh desa. Lembang termasuk di dalamnya.

Camat Lembang, Herman Permadi mengatakan, memang ada beberapa titik yang perlu ditempuh upaya relokasi. Sebut saja Kampung Sukapinggir, Desa Jayagiri dan Pagerwangi yang memang perlu dilakukan satu bentuk relokasi.

Pasalnya menurut dia, warga di kawasan tersebut tetap berada di sana. Dia khawatir ada korban jiwa jika sewaktu-waktu bencana datang.

"Saya kemarin sudah cek juga memang harus ada upaya preventif, jangan sampai masyarakat menganggap hal ini biasa," katanya, Senin (15/11). Ia menuturkan, banyak

masyarakat yang mengaku sudah terbiasa dengan bencana yang terjadi setiap tahunnya. Namun, ia menyebut hal ini tidak biasa dan harus diantisipasi.

"Sebagai contoh Kampung Sukapinggir itu memang bekas galian pasir, mereka membangun tanpa ada aturan," tuturnya.

"Pertama kali terjadi bencana pada 2 November. Lalu, terjadi lagi pada 10 November," ujarnya.

Selanjutnya, sambung dia, terjadi lagi bencana di Pagerwangi. Ironisnya, warga membangun rumah di bekas tempat pembuangan sampah.

"Ini yang kami perlu berikan edukasi, tentang bagaimana caranya harus ada langkah preventif dan nyata," ucapnya.

Rencananya, kata dia, siang ini pihaknya bakal mengumpulkan seluruh kepala desa untuk duduk bersama membuat konsep mitigasi bencana.

"Saya minta cari tanah desa atau kita cari gedung sendiri

untuk relokasi sementara. Dalam arti bukan kita mendahului kebijakan kabupaten. Tapi kita antisipasi dulu membuat suatu bentuk skema. Jadi apabila terjadi kan sudah ada siap," bebernya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Bandung Barat, Hengky Kurniawan mengatakan, bencana memang tidak bisa diprediksi dan bisa terjadi kapan saja.

Namun, paling tidak pihaknya sudah melakukan langkah antisipasi.

"Hari ini laporan dari camat beberapa daerah yang rawan, kita dari pemerintah mengharapkan relokasi. mohon diikuti karena memang kondisinya membahayakan," ujarnya.

Ia mengimbau, untuk masyarakat yang hari ini tinggal di tebing-tebing itu mohon untuk tinggal di tempat yang aman untuk sementara ini.

"Karena secara geografis wilayah KBB itu rawan bencana," ujarnya. ● pur



IDN/ANTARA

PASAR DIKELOLA BUMDES JABAR JUARA

Petugas menarik retribusi pasar yang dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Imbanagara, Desa Imbanagara Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Senin (15/11). Pemerintah Provinsi Jabar terus mengupayakan kemajuan desa untuk meningkatkan aktivitas perekonomian masyarakat di desa dengan meluncurkan program BUMDes Jabar juara seperti One Village One Company (OVOC) dan Desa Digital.

Langgar Kapasitas, Tiga Hotel di Pangandaran Disanksi Tipiring

PANGANDARAN (IM)- Aparat Polres Ciamis melakukan penindakan terhadap 3 hotel di pantai Pangandaran yang dianggap melanggar aturan protokol kesehatan dan melebihi batas kapasitas maksimal.

Tiga hotel yang terdiri dari hotel Grand Pasifik, Fortuna dan Melia Beach itu dikenakan tindak pidana ringan. "Tiga hotel kami tindak kemarin, dikenakan Tipiring, nanti hari Kamis menjalani sidang," kata Kapolres Ciamis, AKBP Wahyu Broto Narsono Adhi, Senin (15/11).

Dia menjelaskan pelanggaran paling menonjol dari ketiga hotel itu adalah melebihi kapasitas maksimal 75 persen. "Ketiga hotel tersebut full booked, padahal pada ketentuan PPKM level 1 maksimal 75 persen," kata Wahyu.

Pelanggaran lain adalah hotel tidak menyediakan masker bagi pengunjung, staf tidak menggunakan masker, dan di setiap kamar tidak ada fasilitas hand sanitizer, membiarkan tamu hotel masuk tidak menggunakan masker serta tidak menyiapkan sabun di tempat cuci tangan.

"Dengan demikian hotel-hotel itu telah melanggar Pasal 21 huruf (i) jo Pasal 34 Ayat (1) Perda Prov Jabar No 5 tahun 2021," kata Wahyu.

Wahyu Broto berharap penindakan ini bisa menjadi pelajaran atau memberi efek jera bagi pengusaha hotel di Pangandaran agar senantiasa menaati aturan.

"Pandemi belum berakhir, menjaga Prokes di tempat wisata sama dengan menjaga kelangsungan pariwisata di Pangandaran. Karena jika sampai terjadi klaster, maka akan berdampak pada aktivitas pariwisata itu sendiri," kata pria yang akrab disapa Sony ini.

Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Pangandaran, Tontong Guntari mengaku mendukung penegakan hukum yang dilakukan oleh Polres Ciamis. "Tentu ini sebagai peringatan bagi semua pengusaha hotel dan semua pelaku usaha lainnya agar selalu memperhatikan penerapan protokol kesehatan," kata Tontong.

Pihak Dinas Pariwisata sendiri, kata Tontong selama ini telah berusaha memberikan imbauan kepada pengelola hotel untuk mengikuti aturan.

"Sosialisasi saya kira hampir dilakukan setiap ada kesempatan. Pengusaha hotel harus pro aktif membantu, ingatkan tamunya memakai masker. Kalau perlu hotel menyediakan masker. Jangan sampai malah pegawainya hotelnya sendiri tak pakai masker," kata Tontong. ● pur

Terhambat Diangkut, Sampah Menumpuk di Pasar Gedebage

BANDUNG - Terhambatnya pengangkutan sampah mengakibatkan sampah menumpuk di Pasar Induk Gedebage, Bandung, Jawa Barat, Senin (15/11). Alhasil, aktivitas perdagangan di lokasi terganggu lantaran sampah menumpuk dan menutup sebagian jalan.

Berbagai jenis sampah itu menumpuk di kios-kios hingga pinggir jalan. Bahkan tumpukan sampah telah menguncup setinggi sekira 1 meter. Seorang pedagang, Taufik

mengatakan bahwa biasanya sampah diangkut petugas sebanyak dua kali dalam sepekan. "Ini sudah masuk bulan nggak diangkut," ujarnya.

Dia pun mengkhawatirkan bahwa sampah-sampah itu akan terbawa ke jalan dan selokan sehingga mengakibatkan banjir. Apalagi, kata dia, Pasar Gedebage kerap terjadi genangan usai diguyur hujan. "Sedangkan uang kebersihan terus berjalan tapi nggak ada tindakannya," tuturnya. ● pur